

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DALAM ERA GLOBALISASI

Dalam Rangka 80 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Penyunting
Agus Mulya Karsona
Nadia Astriani
Maret Priyanta
Siti Sarah Afifah

CorBooks

Zainal Mulya

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DALAM ERA GLOBALISASI

**Dalam Rangka 80 Tahun
Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.**

Penyunting

Agus Mulya Karsona
Nadia Astriani
Maret Priyanta
Siti Sarah Afifah

CorBooks



PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DALAM ERA GLOBALISASI

Dalam Rangka 80 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

ISBN 978-602-99552-9-3

Penyunting

Agus Mulya Karsona

Nadia Astriani

Maret Priyanta

Siti Sarah Afifah

Cover dan Reka Letak

Litera Media

Cetakan pertama, Desember 2017

Diterbitkan oleh:

Corleone Books (Corbooks)

Publishing House of Litera Media

Sariwangi Regency – Blok Cemara No. 21 Bandung 40559

Telp./Fax. 022-87801235 Email: medialitera@gmail.com

Website: www.literamedia.com

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

(All right is reserved)

Dicetak oleh RIZKI UTAMA PRESS. Isi di luar tanggungjawab percetakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	iv
Daftar Isi	vi
BAGIAN 1 : ARTIKEL	1
<i>Hak Milik Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia dan Permasalahannya dalam Pembangunan Perekonomian Djuhaendah Hasan</i>	1
<i>Investasi Dan Perizinan</i> ✓ Bagir Manan —	15
<i>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Dan Investasi Di Dunia Bisnis</i> Etty R. Agoes	22
<i>Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Sebagai Pendukung Kegiatan Investasi Di Indonesia</i> Zulfi Diane Zaini	34
<i>Sekuritisasi Aset Sebagai Sarana Pembiayaan Perusahaan</i> R. Kartikasari	56
<i>Peran Sistem Perizinan Dalam Pembangunan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Nasional</i> Daud Silalahi ✓	77
<i>Liberalisasi Persetujuan Penanaman Modal Berdasarkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Dan Implementasi Hukum di Indonesia</i> An An Chandrawulan	90

<i>Arti Penting Keberadaan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Sentosa Sembiring</i>	109
<i>Kebijakan Pemerintah dalam rangka Meningkatkan Kemudahan Berusaha bagi Penanaman Modal Riyatno</i>	126
<i>Gagasan Pengenaan Pajak Progresif Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Dan Potensi Permasalahannya Ida Nurlinda</i>	146
<i>Kewenangan Negara Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Investasi Pada Era Globalisasi Sri Hajati</i>	155
<i>Pemberian Hak atas Tanah untuk Penanaman Modal dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional Nia Kurniati</i>	176
<i>Perkembangan Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Yani Pujiwati</i>	190
<i>Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Indonesia (Reformasi Mentalitas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dan Kesejahteraan Rakyat) Iskandar</i>	205
<i>Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Dan Law Enforcement Pasca Tax Amnesty Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Rukmana Amanwinata - Jessi Pramandhana</i>	225
<i>Tax Amnesty : Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Di Bidang Perpajakan Zainal Muttaqin</i>	250
<i>Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Efa Laela Fakhriah</i>	259
<i>Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Menurut Konvensi New York 1958 Dan Konvensi Washington 1965 Huala Adolf</i>	266
<i>Mitigasi Sengketa Hukum Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai Implikasi Teori Ekonomi Dalam Bidang Hukum Suntana S. Djatnika</i>	283

<i>Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Guna Mendukung Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia</i> Agus Mulya Karsona	304
<i>Kedudukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaku Usaha Atau Pelaku Ekonomi Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis</i> Isis Ikhwansyah	322
<i>Relasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dan Urgensi Pembentukan Konvensi Asean Bagi Perkembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia</i> Eman Suparman	343
<i>Penerapan Keuangan Berkelanjutan Di Sektor Perbankan: Upaya Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan</i> Lastuti Abubakar	357
<i>Saham Sebagai Objek Jaminan Kredit Dalam Perkembangan Hukum Bisnis Di Indonesia</i> Etty H. Djukardi	375
viii <i>Optimalisasi Pemberian Kredit Berkelanjutan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia</i> Etty Mulyati	392
<i>Penjaminan Digital via E-Cash Collateral</i> Tarsisius Murwadji	410
<i>Hukum Harta Kekayaan Indonesia Di Dalam Perkembangan</i> Mariam Darus	429
<i>Korporasi Subjek Tindak Pidana</i> Komariah E Sapardjaja	444
<i>Mengantisipasi Perkembangan Tindak Pidana Dalam Era Globalisasi Perekonomian Indonesia</i> Mien Rukmini	457
<i>Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia</i> Romli Atmasasmita	475
<i>Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembentukan Hukum Sumber Daya Air</i> Agus Surachman-I Gusti Ayu Ketut Rachmi-Yudho Taruno	493
BAGIAN 2 : KESAN DAN PESAN	529

TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF PENEGAKKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN

§

Zainal Muttaqin

Pengampunan Pajak yang diatur dalam UU 11 Tahun 2016 pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan pengampunan pajak sebelumnya, yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan menghimpun data wajib pajak, mengingat jumlah pembayar pajak masih dinilai kecil dan kepatuhan membayar pajak rendah.

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila wajib pajak tidak membayar pajak atau membayar pajak tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dilakukan upaya penegakkan hukum berupa pengenaan sanksi (administrasi, pidana, sita/lelang dan sandera). Pengenaan sanksi pidana dan sita/lelang akan membawa dampak ekonomi yang besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu pengampunan pajak yang menghapuskan sanksi dengan kompensasi berupa uang tebusan merupakan jalan keluar dari upaya penegakkan hukum

Kata Kunci :

pengampunan pajak, penegakan hukum, uang tebusan.